

BAB I

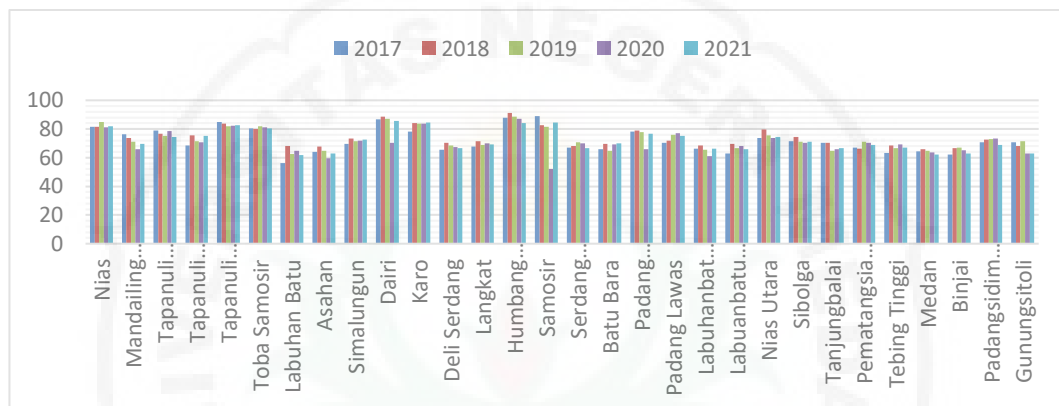
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan posisi peringkat ke empat. Apabila dilihat dari jumlah angkatan kerja, Indonesia berpotensi besar sebagai penggerak perekonomian. Namun, jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar tidak menjadi potensi sumber daya yang dapat dikembangkan untuk menggerakkan perekonomian, melainkan menjadi beban bagi negara berkembang. Oleh karena itu, ketika pertumbuhan penduduk yang cepat disertai dengan generasi tenaga kerja potensial, maka akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika pertumbuhan penduduk yang pesat tidak dibarengi dengan penciptaan tenaga kerja potensial, maka akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Pengangguran masih menjadi masalah terbesar dalam perekonomian dan merupakan salah satu masalah terbesar di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam jangka panjang, dalam kondisi seperti itu, pendidikan merupakan landasan yang paling utama dan penting untuk memecahkan masalah pengangguran di Indonesia. Kesenjangan yang terus melebar menunjukkan peningkatan angkatan kerja yang lebih besar dari ketersediaan lapangan kerja. Ketika krisis ekonomi melanda, kondisi tersebut semakin memburuk. Pemutusan Hubungan Kerja (HK) menjadi masalah terbesar bagi karyawan akibat dampak krisis ekonomi saat ini, dan ketersediaan lapangan kerja yang semakin rendah (Nisa dan Sugiharti, 2023).

Pengangguran di Indonesia merupakan fenomena sosial yang meningkat setiap tahunnya. Khususnya di Sumatera Utara, jumlah pengangguran masih cukup tinggi. Berikut ini adalah data tingkat pengangguran terbuka kategori penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021:



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2023

Gambar 1. 1 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Tahun 2017 – Tahun 2021

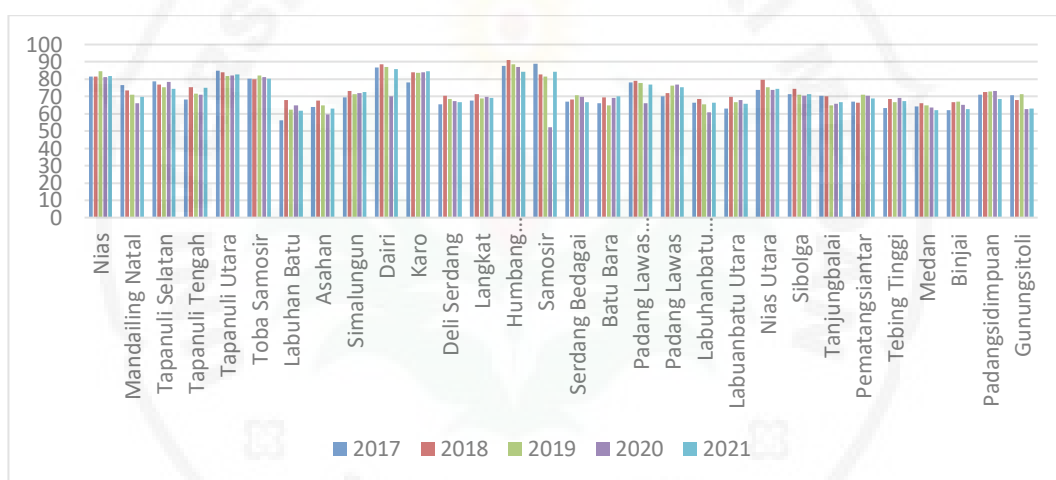
Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Sumatera Utara mengalami fluktuasi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Pematang Siantar memiliki jumlah pengangguran terbanyak di Provinsi Sumatera Utara selama 3 tahun terakhir dan dalam 5 tahun terakhir jumlah pengangguran terbuka di Pematang siantar sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 dan kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2018 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019 dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2020 dan walapun diantara tahun 2018 dan 2019 mengalami sedikit penurunan Kota Pematang siantar tetap menjadi Kota dengan jumlah pengangguran terbuka tertinggi di Sumatera Utara.

Salah satu penyebab tingginya jumlah pengangguran terbuka di Kota Pematang siantar sendiri adalah penambahan jumlah penduduk yang semakin bertambah yang tidak di iringi dengan penambahan lowongan kerja yang tersedia hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah pencari kerja yang berasal dari luar daerah Kota Pematang Siantar yang menyebabkan semakin banyaknya jumlah pencari kerja. Pertumbuhan ekonomi berbanding terbalik dengan jumlah pengangguran, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin rendah tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi Kota pematang siantar sendiri pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tumbuh negatif sebesar 1,89 %. Hal ini tentunya menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya jumlah pengangguran terbuka di Kota Pematang Siantar ditahun 2020.

Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pengangguran terendah di Sumatera Utara yaitu Humbang Hasundutan. Hal ini disebabkan karena mayoritas penduduk yang ada di Kabupaten/Kota Humbang Hasundutan bekerja pada sektor pertanian, Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan daerah yang bercorak agraris, karena itu sektor pertanian menjadi pendukung terbesar sumber perekonomian masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan. Hampir 90% penduduk Humbang Hasundutan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian (<https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id/>).

Angkatan kerja dapat mempengaruhi tingkat pengangguran yang ada di Sumatera Utara. Tingginya tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan membuat penciptaan lapangan pekerjaan yang tersedia sangat minim sehingga penyerapan tenaga kerja pun tidak

maksimal dan akhirnya mengakibatkan pengangguran (Bastari, 2019). Dalam penelitian ini digunakan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat diartikan sebagai seberapa banyak tenaga kerja yang tersedia untuk proses produksi. Berikut ini adalah data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kategori penduduk umur 15 tahun ke atas di Sumatera Utara pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021:



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2023

Gambar 1.2 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Tahun 2017 – Tahun 2021

Berdasarkan gambar 1.2, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sumatera Utara mengalami fluktuasi setiap tahunnya. TPAK tertinggi berada di wilayah Kabupaten Samosir sedangkan TPAK terendah berada di Kabupaten Labuhan Batu. Meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Samosir tinggi yakni rata-rata lebih dari 90%. Sebenarnya hal ini kurang baik bagi kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah yang akan berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian, Kualitas SDM, kesejahteraan masyarakat dan aspek-aspek lainnya di Kabupaten Samosir. Pelaksanaan pendidikan dasar dua belas tahun merupakan

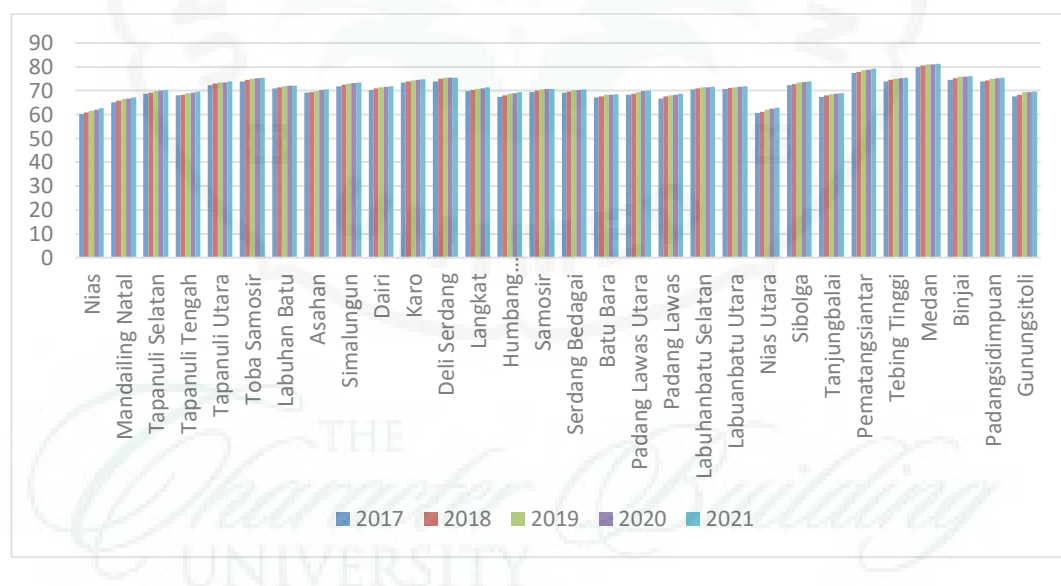
salah satu cara atau upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi tuntutan dunia kerja khususnya di Kabupaten Samosir. Perkembangan pengetahuan seseorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi, dan lamanya menempuh pendidikan akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik di bandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah. Apabila upah pekerja mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak penduduk yang memiliki pendidikan tinggi, maka semakin tinggi produktivitas dan ekonomi nasional akan bertumbuh dengan baik. Untuk itu penduduk yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah berbaur dalam lingkungan pekerjaan (Berutu, dkk, 2022).

Kabupaten Labuhan Batu memiliki TPAK terendah di Sumatera Utara disebabkan oleh kecenderungan perpindahan penduduk terutama penduduk usia kerja keluar daerah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau mungkin tingkat keahlian maupun pekerjaan yang diminati tidak tersedia di Kabupaten Labuhan Batu. Penurunan nilai TPAK di Kabupaten Labuhan Batu juga dapat disebabkan oleh sebagian penduduk setempat ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan keterbatasan lapangan kerja beberapa ibu rumah tangga yang dulunya bekerja membantu suami, memilih menjadi ibu rumah tangga saja untuk mengurus anak-anaknya.

Pada tahun 2019 ke tahun 2020 hanya ada 19 Kabupaten di Sumatera Utara yang mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja sedangkan penganggurannya meningkat disemua kabupaten. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh tingginya pertumbuhan jumlah penduduk. Pada dasarnya, peningkatan jumlah penduduk memiliki dua sisi yang berbeda.

Jumlah penduduk yang besar merupakan modal dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, tetapi di sisi lain dengan pengaturan yang tidak tepat, jumlah penduduk yang besar dapat menimbulkan permasalahan penduduk yang sangat krusial terutama dibidang ketenagakerjaan. Tingginya pertumbuhan penduduk apabila tidak disertai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka mereka tidak mampu menempati lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah tersebut. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui besarnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Mahroji, 2019).

Berikut ini adalah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021:



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2023

Gambar 1.3 Grafik Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara Tahun 2014 – Tahun 2021

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rata-rata Indeks Pembangunan Manusia yang ada di tiap Kabupaten/Kota

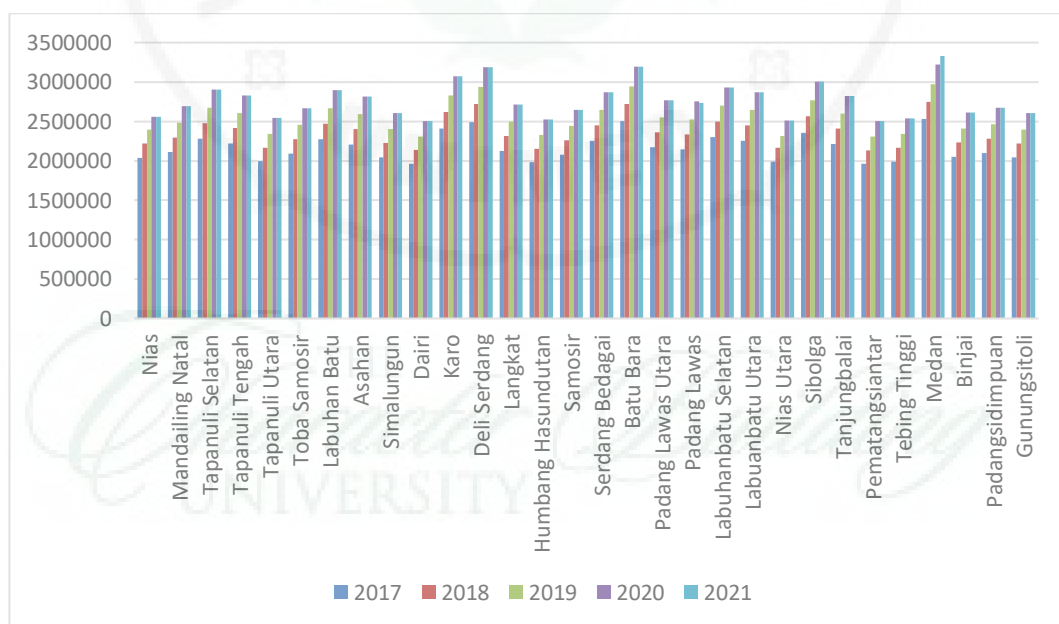
Sumatera Utara meningkat. Indeks Pembangunan Manusia tertinggi yaitu Kota Medan dan terendah yaitu Nias Utara. Kesenjangan antara kota dengan IPM tertinggi di Sumatera Utara dan yang terendah. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor pembentuk IPM yakni pendidikan (pengetahuan), kesehatan dan standar hidup yang layak. Untuk Kota Medan jumlah fasilitas pendidikan dirasa lebih banyak sehingga lebih mudah dijangkau aksesnya, berbanding terbalik dengan Kabupaten Nias Utara yang kemungkinan besar fasilitas pendidikannya masih minim sehingga sulit diakses.

Selanjutnya dari dimensi kesehatan, Kota Medan memiliki jumlah fasilitas kesehatan terbanyak diantara kab/kota lainnya di Sumatera Utara. Tidak salah bila IPM kota Medan menjadi yang tertinggi, karena mudahnya mendapatkan akses dan bantuan kesehatan, berbanding terbalik dengan Kabupaten Nias Utara yang memiliki rumah sakit umum maupun khusus, dan jumlah layanan kesehatan seperti Klinik/Balai Kesehatan yang tidak sebanding dengan Kota Medan. Hal ini menjadi salah satu faktor dari rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Nias Utara, sehingga menyebabkan nilai IPM nya juga rendah karena rendahnya angka harapan hidup.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup baik, namun tingkat penganggurannya yang cenderung berfluktuasi. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan adalah dengan meningkatkan upah yang diterima masyarakat melalui kebijakan upah minimum yaitu dengan mengusahakan kenaikan upah tenaga kerja per kapita agar upah rata-rata angkatan kerja meningkat (Iksan, Arifin,

dan Suliswanto, 2020). Pemerintah Sumatera Utara telah berusaha meningkatkan upah yang diterima oleh masyarakat meskipun tetap saja menimbulkan permasalahan baru. Perbedaan upah minimum tiap provinsi yang ada di Sumatera Utara memicu terjadinya migrasi penduduk.

Kenaikan upah minimum berpengaruh terhadap peningkatan daya beli pekerja sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Namun, kenaikan upah minimum mengharuskan pengusaha untuk menyesuaikan tingkat upah yang telah ditetapkan pemerintah. Adanya kenaikan upah minimum ini membuat pengusaha harus mengurasi jumlah tenaga kerja. Berikut ini adalah data upah minimum provinsi dan kabupaten di Sumatera Utara pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021:



Sumber: *Sindang Sumut Prov, 2023*

Gambar 1. 4 Grafik Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten di Sumatera Utara Tahun 2014 – Tahun 2021

Dari gambar 1.4 dapat dilihat bahwa upah minimum di provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan setiap tahunnya. Upah minimum tertinggi yaitu Kota Medan dan terendah yaitu Kota Pematang Siantar. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan hidup para pekerja semakin meningkat setiap tahunnya. Kenaikan upah minimum provinsi mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Hal ini karena kenaikan upah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan kesempatan kerja dengan meningkatkan konsumsi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat upah di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup baik, namun tingkat penganggurannya yang cenderung berfluktuasi.

Sejalan dengan pandangan teori Neo Klasik yang melihat bahwa pengangguran akan meningkat manakala upah yang ditawarkan ke pasar tenaga kerja meningkat, mengakibatkan permintaan atas tenaga kerja akan menurun atau dapat dikatakan bahwa perusahaan akan mengurangi jumlah karyawannya yang ada (Pemutusan Hubungan Kerja) dalam upaya mengatasi peningkatan jumlah upah yang ditawarkan, demikian pula sebaliknya ketika terjadi penurunan tingkat upah maka akan mengakibatkan jumlah tenaga kerja dapat terserap dengan maksimal.

Kasus permasalahan pengangguran dirasa sudah cukup parah bagi pembangunan ekonomi khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Beberapa indikator-indikator ekonomi sangat berpengaruh terhadap jumlah pengangguran. Maka peneliti mengambil judul penelitian **“Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Pengangguran di Sumatera Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 hanya ada 19 Kabupaten di Sumatera Utara yang mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja sedangkan penganggurannya meningkat disemua kabupaten.
2. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rata-rata Indeks Pembangunan Manusia yang ada di tiap Kabupaten/Kota Sumatera Utara meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup baik, namun tingkat penganggurannya yang cenderung berfluktuasi.
3. Tingkat upah di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup baik, namun tingkat penganggurannya yang cenderung berfluktuasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membatasi serta memperdalam penelitian, penulis memperkecil cakupan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Variabel yang digunakan berkaitan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks pembangunan manusia (ipm), upah minimum kabupaten/kota dan tingkat pengangguran terbuka yaitu dengan jenis pengangguran siklikal.
2. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penelitian ini eksklusif untuk Provinsi Sumatera Utara.

3. Penelitian ini menggunakan data panel dari 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu lima tahun (2017-2021).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah Upah berpengaruh terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara?
4. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat di tulis tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.

3. Untuk menganalisis pengaruh Upah terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti dalam masalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah dan Pengangguran, serta merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah

Dijadikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan dalam mengatasi masalah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara yang berhubungan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah.

3. Bagi Universitas

Agar penelitian ini dapat menjadi pedoman belajar dan sumber referensi bacaan di perpustakaan Universitas Negeri Medan serta dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah dan kontribusi untuk peneliti terkait pengangguran di masa depan untuk menambah informasi serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.